

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu daerah atau negara dikatakan berhasil dapat tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan ekonomi pada suatu daerah atau negara perlu memperhatikan dinamika dan perkembangan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menganalisis perkembangan perekonomian suatu negara. Suatu perekonomian dapat dikatakan berhasil dan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan dalam jumlah produksi barang dan jasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut akan berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fauzi & Suhaidi, 2022).

Pembangunan ekonomi regional merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat setempat mengelola sumber daya yang tersedia serta membangun pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor privat guna menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi, di wilayah bersangkutan. Indikator keberhasilan pembangunan tersebut dapat diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi, komposisi struktur ekonomi, serta penurunan disparitas pendapatan di antara penduduk, antarwilayah, dan antarsektor. Pertumbuhan ekonomi, yang diwujudkan melalui pembangunan ekonomi, merupakan prasyarat mendasar dalam mendukung tercapainya pembangunan manusia. Melalui pembangunan ekonomi, produktivitas dan pendapatan

masyarakat dapat ditingkatkan melalui penciptaan peluang kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, suatu negara mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Pembangunan regional diharapkan juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Hastin, 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator utama untuk melihat keadaan perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu sebagai acuan, sehingga dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil. Pertumbuhan ekonomi, atau peningkatan kegiatan ekonomi, merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan manusia. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja yang lebih luas (Susilowati & Adianita, 2023).

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang tercermin dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menunjukkan bahwa suatu daerah mengalami perkembangan dalam kegiatan perekonomian. Namun demikian, beberapa provinsi di Pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) justru menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi-provinsi tersebut. Padahal, ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Suryono, 2010)

Kawasan Strategis Joglosemar (Yogyakarta, Solo/Surakarta, dan Semarang) merupakan segitiga emas pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan DIY yang memiliki peran vital dalam pembangunan daerah. Kawasan

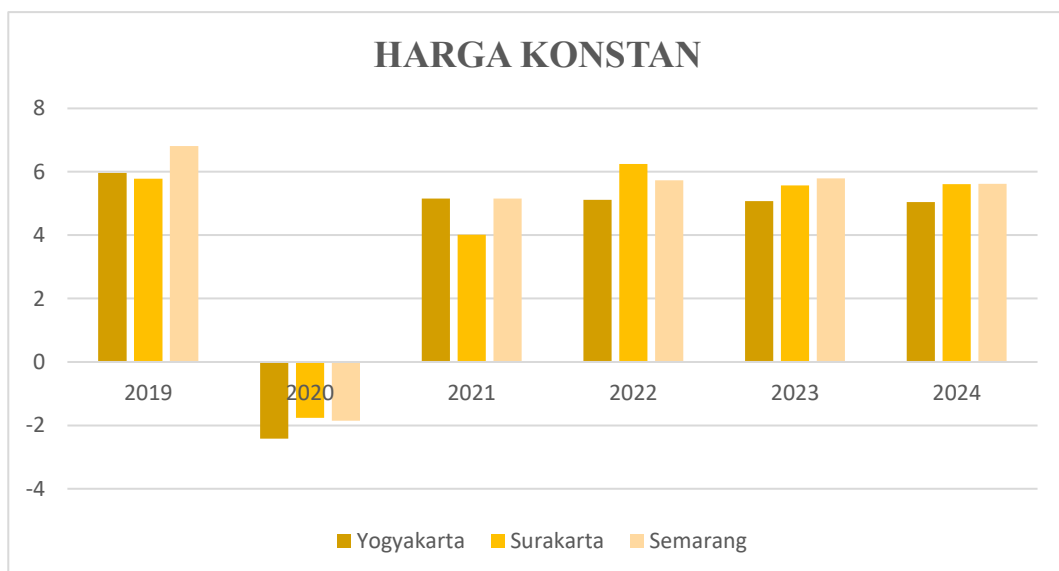
ini ditetapkan sebagai prioritas pembangunan nasional karena posisinya yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan industri di Jawa bagian tengah. Sebagai komponen integral dari implementasi pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah memainkan peran signifikan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Setiap provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah, diharapkan mampu menangani tantangan perekonomian global, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, khususnya dalam era reformasi di mana setiap daerah diberikan kebebasan luas untuk mengelola kekayaan daerahnya dan memanfaatkannya bagi kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing (Indrasari, 2022).

Dalam konteks tuntutan percepatan pembangunan daerah di kawasan strategis Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar), perencanaan pembangunan seharusnya diorientasikan pada implementasi strategi pengembangan potensi lokal melalui aktualisasi konsep pengembangan kawasan andalan yang efektif dalam mengelola sumber daya daerah guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai langkah awal, diperlukan kajian komprehensif atau penelitian mendalam mengenai aspek-aspek ekonomi wilayah, dengan tujuan mengidentifikasi potensi ekonomi di kawasan andalan Joglosemar (Noviani, 2010).

Hingga saat ini di Kawasan Joglosemar masih dihadapkan pada permasalahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada jumlah PDRB masing-masing daerah. Walaupun pertumbuhan ekonomi tersebut dalam kondisi stabil, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lain di Pulau Jawa maupun Indonesia, pertumbuhan ekonomi di

Kawasan Joglosemar masih tergolong rendah. Menurut laporan Bank Indonesia struktur ekonominya lebih didominasi oleh konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 3,05% terhadap pertumbuhan PDRB, sementara pertumbuhan sektor industri pengolahan masih terbatas. Selain itu, keterbatasan sumber daya alam serta basis industri besar juga menjadi faktor yang menyebabkan kontribusi terhadap PDRB tidak setinggi daerah dengan sektor industri atau pertambangan yang kuat. Seperti yang dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan di Kawasan Joglosemar Tahun 2019-2024 (persen).



Sumber data: BPS Tahun 2019-2024

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan PDRB di Kawasan Joglosemar mengalami fluktuasi. Dibandingkan dengan kab/kota lain di pulau Jawa, nilai PDRB di Kawasan Joglosemar relatif lebih rendah. Tahun 2020 tercatat mengalami penurunan ekonomi yang signifikan Yogyakarta sebesar -2,42%, Surakarta -1,76% dan Semarang -1,85% karena dampak covid-19 yang mengakibatkan kemacetan di sektor ekonomi. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi semakin menurun.

Kota Yogyakarta, Surakarta (Solo), dan Semarang termasuk dalam Kawasan Strategis Ekonomi Nasional (KSE). Salah satu arah pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang memiliki daya saing. Dalam rangka memperkuat daya saing tersebut, pembangunan nasional jangka panjang diarahkan pada penguatan perekonomian domestik yang berbasis pada keunggulan masing-masing wilayah, sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif melalui keterpaduan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan dalam negeri. Selain itu, Kota Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang juga termasuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang tergolong dalam kelompok WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merumuskan konsep WPS dengan tujuan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur wilayah dengan pengembangan kawasan strategis serta memperkuat keterkaitan antar kawasan strategis secara terpadu.

Usaha untuk mewujudkan pembangunan daerah dan kemandirian kabupaten/kota dapat dievaluasi melalui laju pertumbuhan wilayah tersebut. Semakin tinggi laju pertumbuhan suatu daerah, maka dapat diinferensikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut semakin baik. Sebaliknya, apabila laju pertumbuhan suatu daerah rendah, maka kemungkinan besar tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga rendah (Damayanti, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa oleh penduduk suatu negara, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dari aktivitas produksi tersebut. Masyarakat yang

memiliki pendapatan tersebut akan mengkonsumsi hasil produksi, sehingga mendorong kemakmuran hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Peningkatan output per kapita masyarakat berkontribusi pada peningkatan taraf hidup. Output per kapita didefinisikan sebagai total output yang dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Dengan demikian, peningkatan output per kapita dapat mengindikasikan apakah rata-rata pendapatan individu di suatu negara mengalami kenaikan atau tidak. Persentase pertambahan output tersebut harus melebihi persentase pertambahan jumlah penduduk, dengan kecenderungan yang konsisten dalam jangka panjang.

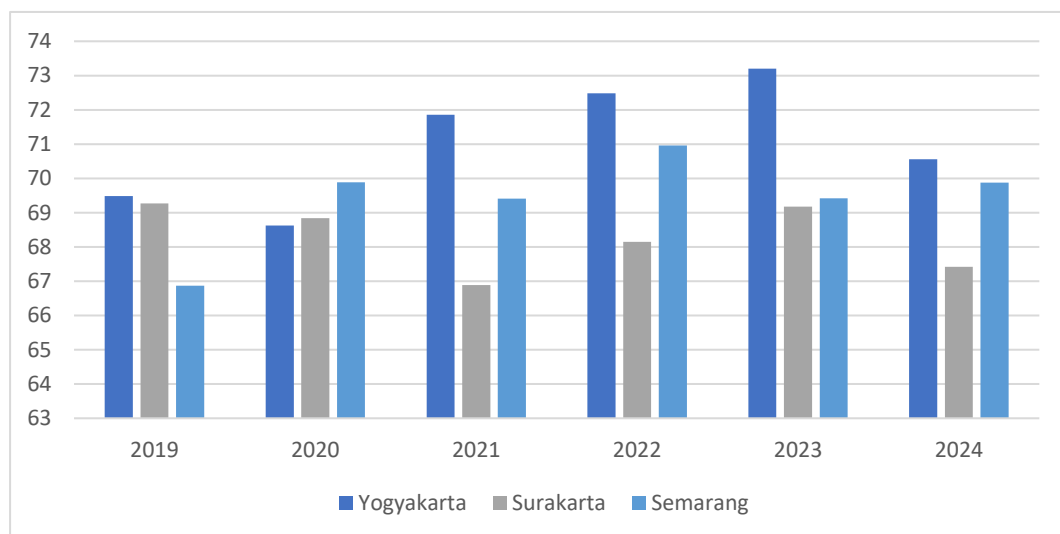
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produksi dalam suatu perekonomian daerah. PDRB mencerminkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Besaran PDRB juga memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa peningkatan PDRB menunjukkan kenaikan nilai tambah output dari aktivitas produksi dan penjualan di seluruh unit ekonomi daerah, maka kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kesempatan kerja dan jumlah angkatan kerja yang terserap di wilayah tersebut (Tarman, 2021).

Keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dapat tercermin dari ketersediaan lapangan kerja serta menurunnya tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja sendiri merujuk pada jumlah tenaga kerja yang dimanfaatkan dalam suatu unit usaha tertentu. Ketersediaan kesempatan kerja akan mendorong terserapnya tenaga kerja, yang selanjutnya diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli. Kondisi

tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ardiawan & Utama, 2024).

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi diharapkan mampu meningkatkan aktivitas produksi sehingga dapat mendorong peningkatan output daerah. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang produktif, kegiatan ekonomi akan berkembang dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai PDRB. Jumlah tenaga kerja di kawasan Joglosemar cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 angkatan kerja/TPAK mengalami peningkatan mencapai 71,72% mencerminkan pemulihan ekonomi. Namun demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja yang seimbang dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut adalah gambar yang menunjukkan data tenaga kerja di Kawasan Joglosemar dari tahun 2019-2024.

Gambar 1. 2 TPAK di Kawasan Joglosemar Tahun 2019-2024 (Persen).



Sumber data: BPS Prov DIY dan Jawa Tengah 2019-2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar pula ketersediaan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dalam proses produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam gambar 1.2 terlihat bahwa beberapa kota mengalami perubahan TPAK dari tahun ketahun. Selama periode 2019–2024, TPAK di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Yogyakarta mencatat tingkat partisipasi tertinggi pada 2023 sebesar 73,20%, sedangkan Surakarta dan Semarang menunjukkan pergerakan yang relatif stabil meskipun mengalami beberapa penurunan pada tahun-tahun tertentu. Kondisi ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi regional.

Menurut pandangan (Utami, 2013) penurunan laju pertumbuhan yang tercermin dari koefisien regresi variabel tenaga kerja mengindikasikan terjadinya penurunan produktivitas marginal tenaga kerja (*marginal productivity of labor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap penambahan tenaga kerja dalam proses produksi tidak lagi meningkatkan output, bahkan berpotensi menurunkan tingkat produksi. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terus terjadi tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas yang memadai. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia, yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja

menjadi relatif rendah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita juga masih terbatas.

Tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor strategis dalam proses pembangunan nasional dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja secara optimal diyakini dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi tradisional, pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah angkatan kerja dipandang sebagai faktor yang memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Indradewa & Natha, 2015).

Istilah tenaga kerja merujuk pada jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, khususnya di kawasan Joglosemar. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar mencerminkan ketersediaan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga berpotensi meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah memungkinkan peningkatan output melalui proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula potensi produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi juga memperluas ukuran pasar yang berfungsi sebagai penampung hasil produksi, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, besarnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Apabila peningkatan jumlah penduduk tidak disertai dengan peningkatan kualitas,

kondisi tersebut justru dapat menjadi beban bagi perekonomian daerah (Fitriani, 2017).

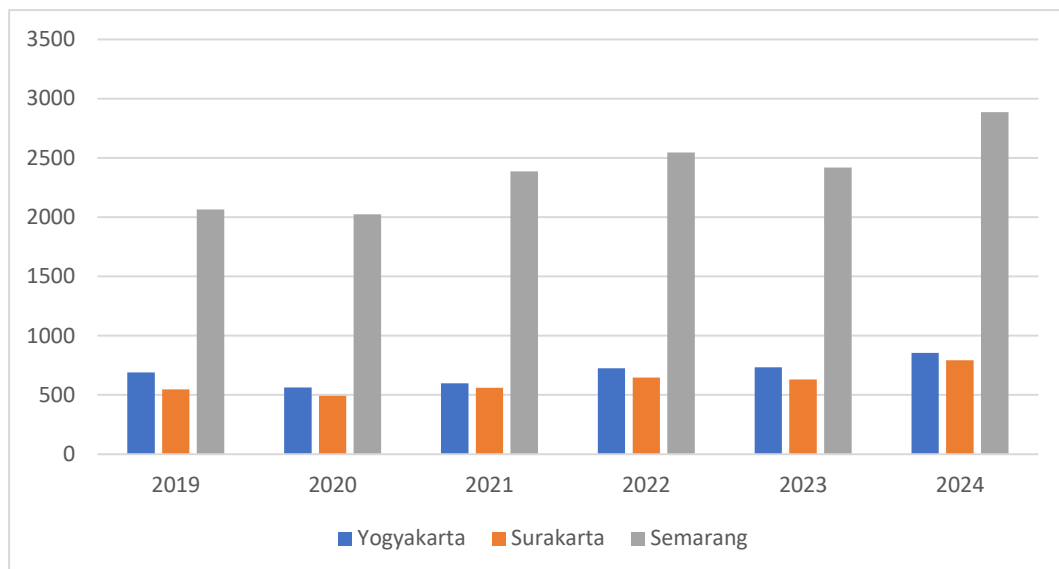
Salah satu faktor lain yang memengaruhi PDRB per kapita di Kawasan Joglosemar adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berfungsi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi. Pembangunan daerah pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan nilai output yang dihasilkan oleh berbagai sektor, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan atau kemunduran kinerja perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu (Yuliana, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah menurut BPS menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun terutama pada kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 2.885,77 M, semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tingkat kemandirian suatu daerah juga semakin meningkat, yang tercermin dari berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah masih menghadapi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dalam bentuk subsidi maupun bantuan keuangan, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Ketimpangan antar daerah juga mencolok. Menurut (Christia & Ispriyarso, 2019) Perbedaan kapasitas fiskal antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas proses perencanaan pembangunan.

PAD sendiri merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayah daerah tersebut dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas, inovasi, serta pemikiran yang dinamis dari pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan daerah. Walaupun suatu daerah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, masih terdapat banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Perbedaan karakteristik dan kondisi antar daerah menyebabkan kebijakan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, sehingga tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya (Kamila, 2016).

Saat ini pemerintah daerah masih cenderung bergantung pada DAU dan DBH dalam membiayai belanja modal serta pembangunan, tanpa mengoptimalkan pendapatan dan potensi yang dimiliki daerah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri (Syahrani et al., 2025). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kawasan Joglosemar, diperlukan kemampuan yang memadai dalam mengelola Anggaran Pendapatan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Oleh karena itu, anggaran daerah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran pendapatan berperan sebagai instrumen untuk menetapkan besaran penerimaan dan pengeluaran daerah, mendukung proses pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan. Seperti gambar 1.3 berikut yang menunjukkan data PAD di Kawasan Joglosemar dari tahun 2019-2024.

Gambar 1. 3 Data Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Joglosemar tahun 2019-2024 (milyar)



Sumber data: SIKD Kemenkeu Tahun 2019-2024

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019–2024 pada tiga wilayah di kawasan Joglosemar, yaitu Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, dan Kota Semarang, terlihat adanya dinamika perkembangan yang berbeda di masing-masing daerah. Secara umum, PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan secara mandiri melalui pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD Kota Yogyakarta mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dari 689,05 M menjadi 563,17 M penurunan ini mengindikasikan adanya kontraksi aktivitas ekonomi daerah. Namun demikian, pada periode selanjutnya PAD Yogyakarta menunjukkan pemulihan yang konsisten, meningkat menjadi 598,12 M pada tahun 2021 dan terus bertambah hingga mencapai 855,10 M pada tahun 2024. PAD Kota Surakarta juga menunjukkan pola yang relatif serupa. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dari 546,02 M menjadi 492,78 M. Namun, pada tahun-

tahun berikutnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 647,44 M pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, PAD Surakarta kembali meningkat secara tajam pada tahun 2024 hingga mencapai 792,40 M.

PAD Kota Semarang sebagai kota dengan nilai PAD terbesar di antara ketiga daerah menunjukkan fluktuasi yang lebih dinamis. PAD mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 dari 2.066,33 M menjadi 2.024,54 M, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 2.545,99 M. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, PAD kembali meningkat secara tajam pada tahun 2024 menjadi 2.885,77 M.

Berdasarkan prinsip kesatuan negara, pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemandirian daerah dalam mengelola rumah tangganya tidak dapat diartikan bahwa setiap pemerintah daerah harus sepenuhnya membiayai seluruh pengeluarannya hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi suatu keharusan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu tantangan penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2024, tingkat inflasi diperkirakan mencapai sekitar 3,19 persen, sedikit

lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sekitar 3 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Inflasi yang meningkat dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena kenaikan harga barang dan jasa tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Akibatnya, konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dapat mengalami perlambatan. Sementara itu, kenaikan suku bunga juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya pada tahun 2024 untuk mengatasi inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi tahunan pada April 2025 (Year on Year-YoY) sebesar 1,94 persen. Angka masih terkendali, bila dibandingkan inflasi pada April 2024 yang mencatat 3,27 persen. Keberadaan inflasi di suatu kota mencerminkan adanya dinamika atau gejolak dalam kondisi perekonomian. Apabila inflasi tersebut dibiarkan tanpa pengendalian, maka dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap perekonomian. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tergolong baik umumnya berada di bawah 10 persen, sedangkan apabila inflasi mencapai lebih dari 25 persen, maka akan menyebabkan kenaikan harga barang secara signifikan serta berpotensi menurunkan nilai tukar rupiah (Susanto, 2014).

Inflasi sebagai suatu fenomena ekonomi memiliki implikasi positif maupun negatif terhadap perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil mencerminkan adanya ketidakstabilan kondisi ekonomi yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan, karena masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi mengalami

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut akibat meningkatnya harga barang dan jasa. Pada akhirnya, keadaan ini turut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi (Sjahrudin et al., 2024). Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui kebijakan yang tepat dan terukur, mengingat langkah yang diambil dapat berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut gambar 1.4 yang menunjukkan data tingkat inflasi di Kawasan Joglosemar dari tahun 2019-2024.

Gambar 1. 4 Data Inflasi di Kawasan Joglosemar Tahun 2019-2024 (persen)



Sumber data: BPS Tahun 2019-2024

Secara umum, tingkat inflasi di Kota Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019, inflasi berada pada tingkat moderat sekitar 2–3 persen, kemudian menurun pada tahun 2020 akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, inflasi mulai meningkat secara bertahap seiring dengan proses pemulihan ekonomi. Tekanan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan kenaikan yang signifikan terutama di Surakarta 7,03% dan Yogyakarta 6,49%. Setelah itu, inflasi kembali menurun pada tahun 2023 dan semakin stabil pada tahun 2024 dengan tingkat inflasi yang

relatif rendah di ketiga kota. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa setelah mengalami lonjakan pada tahun 2022, inflasi kembali terkendali pada periode berikutnya.

Kenaikan biaya hidup dari waktu ke waktu terjadi sebagai akibat dari inflasi, yaitu suatu kondisi yang mencerminkan peningkatan harga barang dan jasa secara terus menerus. Fenomena ini dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Inflasi tidak selalu berdampak negatif apabila berada pada tingkat yang stabil dan terkendali. Namun, inflasi dapat menjadi permasalahan serius ketika mencapai tingkat yang tinggi karena berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan dan pengeluaran negara. Kenaikan inflasi yang ditandai dengan peningkatan harga barang dan jasa secara umum mempengaruhi struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), fenomena inflasi ini berdampak juga terhadap persepsi masyarakat terhadap beban perpajakan, dimana terdapat kecenderungan bahwa peningkatan pajak turut berkontribusi terhadap kenaikan harga yang berlaku di pasar (Resky, 2023).

Menurut Nanga 2005:248 dalam penelitian (Arin, 2019) Inflasi yang terjadi dalam perekonomian suatu daerah menimbulkan berbagai dampak, salah satunya terhadap perubahan tingkat output dan penyerapan tenaga kerja. Inflasi dapat mendorong perusahaan untuk menyesuaikan tingkat produksinya, baik meningkatkan maupun menurunkannya, tergantung pada tingkat atau intensitas inflasi yang terjadi. Apabila inflasi masih berada pada kategori ringan, perusahaan cenderung meningkatkan jumlah output atau produksi. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga yang masih dalam batas wajar sehingga mampu meningkatkan insentif dan motivasi produsen untuk memproduksi lebih banyak. Peningkatan

produksi tersebut juga diikuti oleh penambahan faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja. Dalam situasi ini, permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat sehingga memperluas penyerapan tenaga kerja. Pada akhirnya, peningkatan kesempatan kerja tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi melalui kenaikan pendapatan nasional.

Oleh karena itu, tingkat inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara, sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang tepat dan efektif untuk menjaga stabilitas inflasi. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja di suatu provinsi, serta peningkatan inflasi dapat berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi memberikan konsekuensi negatif baik bagi individu maupun pemerintah, antara lain memicu ketidakstabilan ekonomi, menghambat laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan angka kemiskinan dan kerentanan sosial ekonomi.

Fenomena dari penelitian ini yaitu, peristiwa yang diamati dalam penelitian ini terkait tenaga kerja, pendapatan asli daerah, dan inflasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada PDRB di Kawasan Strategis Joglosemar. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, yang berpotensi memengaruhi tingkat produktivitas serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dapat menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Alfiani Fela, 2024).

Berdasarkan dari permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN INFLASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KAWASAN STRATEGIS JOGLOSEMAR TAHUN 2019-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, rumusan masalah utama yang akan dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di kawasan strategis Joglosemar?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap PDRB di kawasan strategis Joglosemar?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap PDRB di kawasan strategis Joglosemar?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan tenaga kerja, pendapatan asli daerah dan inflasi terhadap PDRB di kawasan strategis Joglosemar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat di susun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis variabel tenaga kerja terhadap PDRB Kawasan Strategis Joglosemar.
2. Untuk menganalisis variabel pendapatan asli daerah terhadap PDRB Kawasan Strategis Joglosemar.

3. Untuk menganalisis variabel inflasi terhadap PDRB Kawasan Strategis Joglosemar.
4. Untuk menganalisis pengaruh simultan tenaga kerja, pendapatan asli daerah dan Inflasi terhadap PDRB di Kawasan Strategis Joglosemar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat yang luas seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang pengaruh tenaga kerja, pendapatan asli daerah, dan inflasi terhadap PDRB Kawasan Strategis Joglosemar, baik bagi penulis maupun Universitas Bojonegoro dengan menambah referensi bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan kepada peneliti serta menjadi acuan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang variabel yang sama. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna dan menambah wawasan serta referensi dalam konteks analisis yang sama.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, adanya batasan penelitian untuk menjaga fokus pada tujuan penelitian dan akan tetap berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

Ada batasan-batasan tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas variabel Tenaga Kerja, PAD dan Inflasi sebagai variabel independen. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel

yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel dependen.

2. Penelitian ini hanya berfokus di Kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Surakarta/Solo, Semarang) Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel selama periode 2019-2024. Bersumber dari lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenkeu.